

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdebatan antara relasi agama dengan negara memang bukan tergolong baru dalam politik. Akan tetapi, kini mendapat aktualisasinya kembali setelah merebaknya fenomena fundamentalisme Islam yang memperkenalkan berdirinya negara Islam, kesatuan antara agama dan negara. Pengalaman masyarakat muslim di sejumlah negara menunjukkan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam dan negara. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan konsep dan kultur masyarakat muslim.¹ Dalam Islam sendiri, representasi aktual hubungan agama dengan negara sepeninggal Nabi Muhammad Saw. dan berakhirnya masa kepemimpinan Khulafa Rasyidin masih diperdebatkan. Alasannya, al-Qur'an ataupun al-Sunnah sendiri tidak menggariskan secara tegas terkait sistem politik Islam.

Secara umum konsep hubungan antara agama dengan negara dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yakni *integrated*, *intersectional* dan *separated*. Hubungan *integrated* adalah hubungan yang menyatu antara agama dan negara, dimana aturan-aturan agama secara otomatis menjadi aturan-aturan negara, dan kepemimpinan keagamaanpun sekaligus menjadi pemimpin negara, seperti praktek kenegaraan di Iran dan Vatikan. Hubungan *intersectional* adalah

¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008. hal. 76.

hubungan yang menggambarkan adanya persinggungan antara agama dan negara. Adakalanya persinggungan ini hampir sempurna, yakni jika hukum-hukum agama menjadi hukum positif sebuah negara, seperti praktek kenegaraan di Arab Saudi. Adakalanya persinggungan ini hanya sebagian saja, yakni jika sebuah negara hanya sedikit saja mengadopsi hukum agama menjadi hukum positif, seperti praktek kenegaraan di Indonesia. Hubungan sekularistik atau *separated*, adalah hubungan pemisahan antara agama dan negara seperti praktek kenegaraan di Turki dan sebagian besar dunia kristen. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau menolak determinasi Islam dalam negara.² Dari konsep ketiga di atas ini menunjukan beragamnya konsep hubungan agama dan negara.

Sebelum memasuki periode modern, suatu periode dimana kaum muslimin banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Eropa dalam memisahkan antara agama dan politik, semua pemikiran politik dari para pemikir Islam diwarnai dengan corak keagamaan. Dengan kata lain, pemikiran politik dalam Islam betapapun banyak ragamnya, semuanya tidak ada yang lepas dari kaitan agama. Hal ini karena kaum muslimin berusaha mencari petunjuk dari ajaran agama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan dunia.

Bagi Islam, khususnya negara (*daulah*) dan politik dipandang sebagai suatu yang agung dan menjadi bagian yang integral dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., sebab Islam merupakan agama yang

² Syamsudin. *Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Hal. 46-47.

universal yang mengacu berbagai aspek kehidupan dari bidang muamalah sampai dengan aqidah. Oleh karena itu, pengaturan dan pandangan bermunculan mengenai hubungan agama dengan negara.

Salah seorang pemikir politik Islam abad klasik dan pertengahan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang sejarah sosial dan politik dalam bukunya yang fenomenal yaitu *Muqaddimah* adalah Ibnu Khaldun (1332-1406 M), nama lengkapnya Wali al-Din ‘Abd al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakr Muhammad al-Hasan Ibnu Khaldun.³ Keunikan pemikiran Ibnu Khaldun adalah terletak pada apa yang sekarang disebut sebagai *social sciences*. Beberapa penulis tentang Ibnu Khaldun selama ini hanya melihat pemikiran sosiologi dan sejarahnya. Padahal pemikiran politik dalam *Muqaddimah*, terutama ketika membicarakan penulisan sejarah yang *siyashah oriented*, berorientasi politis, dan tema *daulah* adalah tema sentral dalam karyanya tersebut.⁴ Berbeda dengan filosof Islam sebelumnya (al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah) yang lebih menempatkan agama dalam negara secara normatif, Ibnu Khaldun melihat agama secara realistis berdasarkan peran manfaatnya dalam pembangunan kekuasaan negara.

Agama oleh pemikir abad pertengahan diposisikan dalam kerangka normatifnya sebagai kebenaran absolut yang tidak akan lekang dan mengalami perubahan di tengah zaman yang berubah. Namun, ini tidak berarti bahwa semua

³ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. hal. 41.

⁴ Choirul Mahfud. *39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia Dari Socrates Sampai Barack Obama*. Surabaya: Jaring Pena (Lini Penerbitan JP BOOKS) Anggota IKAPI. 2009. hal. 45.

pemikir abad pertengahan memaknai agama dalam perspektif normative-idealnya, salah seorang yang mampu melihat hubungan agama dan Negara secara lebih proporsional dari deretan pemikir abad pertengahan adalah Ibnu Khaldun.

Sosok Ibnu Khaldun (1332-1406 M) tercatat sebagai ilmuwan muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan rasional-historis dalam wacana keilmuan Islam. Dengan teorinya *the culture cycle theory of history*, Ibnu Khaldun mencoba menganalisa secara rasional perkembangan sejarah masyarakat Islam beserta jatuh banggunya dinasti Islam sebagaimana dituangkan dalam karyanya *Muqaddimah*.

Ruang lingkup pemikiran Ibnu Khaldun sebenarnya tidak hanya terbatas dalam studi sejarah kemasyarakatan, pemikiran politiknya terutama mengenai masalah hubungan agama dan negara merupakan terobosan baru dalam pemikiran politik Islam masa klasik.⁵ Berkaitan masyarakat dengan topik masalah hubungan agama dan negara, jika pemikiran politik filosof klasik lebih nampak spekulatif memposisikan agama dalam posisi normatif layaknya ideal kebenaran yang harus terwujud dalam sejarah, Ibnu Khaldun melihat peran agama dalam politik lebih pada pengaruh dalam pembentukan dan pemeliharaan realitas sosial politik masyarakat. Agama adalah imaji yang menggerakkan politik, namun disaat bersamaan karena kesatuan watak transendental historisnya agama adalah medan simbolik pertarungan politik yang paling esensial dalam membentuk kesadaran masyarakat.

⁵ Menurut Gaston Bouthoul ada tiga tema besar yang coba diangkat oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah* tersebut, yaitu Ilmu Sejarah, Sosiologi dan Ilmu Politik. Gaston Bouthoul. *Teori-teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Titian Illahi Press. 1998. hal. 35-36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan paradigma pemikiran politik Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan negara dalam Muqaddimah?
3. Bagaimana tipologi pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan paradigma pemikiran politik Ibnu Khaldun.
2. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan negara dalam Muqaddimah
3. Untuk mengetahui tipologi pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Siyasah Dusturiyah mengenai relasi agama dan

negara perspektif Ibnu Khaldun, terutama dalam paradigma yang berorientasi pada tata negara politik Islam atau *Siyasah Oriented*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana relasi agama dan negara dalam perspektif Ibnu Khaldun khususnya pada kajian *Siyasah Dusturiyah*, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan dan wawasan dalam menghadapi diskursus mengenai relasi agama dan negara dimasa yang akan datang.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum tata negara politik Islam tentang relasi agama dan negara perspektif Ibnu Khaldun.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai literatur yang telah ditulis oleh para ahli tentang Ibnu Khaldun dan pemikirannya yang tertuang dalam Muqaddimah, baik berupa buku-buku maupun bentuk tulisan artikel lainnya. Salah satunya dalam literatur karya Munawwir Sjaddzali edisi kelima terbit pada tahun 2003 yang berjudul *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, disana dijelaskan pada sub bab

Pemikiran Politik Islam pada Zaman Klasik dan Pertengahan pada bagian Ibnu Khaldun, garis besar mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang: Biografi Ibnu Khaldun; Asal Mula Timbulnya Negara; Jabatan Raja, Khalifah dan Imam; Pengaruh Faktor-faktor Geografi terhadap Politik dan Teori 'ashabiyah Ibnu Khaldun.⁶ Kemudian Ahmad Syafi'i Maarif dalam bukunya yang berjudul *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* lebih memfokuskan pada pembelaan Ibnu Khaldun terhadap berbagai serangan atau tuduhan dari kaum intelektual tentang sikap pesimis atau fatalis Ibnu Khaldun dalam memandang sejarah.⁷

Selain itu, dalam materi jurnal perkuliahan yang disampaikan oleh salah satu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nurrohman pada mata kuliah Siyasah Dusturiyah, dijelaskan mengenai hubungan agama dan kekuasaan secara umum dalam pandangan pemikiran ulama klasik dan pertengahan, pada penjelasan Ibnu Khaldun fokus pembahasan pada pembagian jenis-jenis proses pembentukan kekuasaan politik atau pemerintahan berdasarkan analisa sosio historisnya Ibnu Khaldun.

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya pada jurusan Siyasah, terdapat beberapa skripsi yang mengambil penelitian tentang tema agama dan negara. Namun penelitian tersebut berbeda objek kajian. Yaitu skripsi yang telah ditulis oleh Hanavi Yusuf yang berjudul *Agama dan Negara dalam Pandangan 'Ali Abd al-Raziq* telah diterbitkan pada

⁶ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Jakarta: UI-Press. 2003. hal. 90-107.

⁷ A. Syafii Maarif. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. hal. 31-39.

tahun 2008 M/ 1429 H. Fokus penelitian dipusatkan pada pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq dilatarbelakangi oleh aspek sosial politik berupa keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani, ancaman penjajahan Barat dibidang politik dan sosial budaya, serta keterbelakangan umat Islam di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi.⁸ Kemudian skripsi yang telah ditulis oleh Elyasa Dibda Kusumah yang berjudul *Hubungan Agama dan Negara menurut Azyumardi Azra* telah diterbitkan pada tahun 2008 M/ 1429 H. Fokus penelitian dipusatkan pada pemikiran Azyumardi Azra bahwa agama dan negara berlawanan, artinya memiliki ruang tersendiri, begitu juga negara memiliki ruang tersendiri pula. Oleh karena itu agama dan negara tidak bisa disatukan. Landasan Azyumardi Azra dalam pandangannya mengenai hubungan agama dan negara tersebut adalah fakta sejarah dan pengertian fiqh siyasah yang tidak relevan dengan maknanya yaitu fiqh dan siyasah tidak bisa disatukan.⁹

Adapun penelitian literatur yang telah dilakukan di Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuludin Jurusan Sosiologi Agama dengan objek penelitian tentang Ibnu Khaldun, yaitu oleh Muhammad Iqbal dalam skripsinya yang berjudul *Konsep ‘ashabiyah menurut Ibnu Khaldun* telah diterbitkan pada tahun 2007 M/ 1428 H. Fokus penelitian dipusatkan pada konsep ‘ashabiyah Ibnu Khaldun yaitu sebuah konsep tentang bagaimana manusia mampu

⁸ Skripsi ditulis oleh Hanavi Yusuf yang berjudul *Agama dan Negara dalam Pandangan ‘Ali Abd al-Raziq* telah diterbitkan pada tahun 2008 M/ 1429 H. (Diakses di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁹ Skripsi ditulis oleh Elyasa Dibda Kusumah yang berjudul *Hubungan Agama dan Negara menurut Azyumardi Azra* telah diterbitkan pada tahun 2008 M/ 1429 H. (Diakses di Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

mengintegrasikan, mengakomodir dan menciptakan sebuah sistem yang mampu melahirkan solidaritas sosial yang kuat dengan tujuan dan cita-cita bersama.¹⁰

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan beberapa teori yang diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan rujukan konseptual variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pertama, dalam memahami latar belakang kehidupan sosial dan politik seorang pemikir, penulis menggunakan pendekatan teori sosiologi tradisional atau pendekatan tradisional. Dalam teori ini terdapat dua bahasan yaitu, 1) Paradigma yang digunakan dengan pendekatan sosiologi, 2) Konteks pembahasan menggunakan tiga paradigma utama yaitu organik, konflik dan sosio behavioris.

1) Paradigma dengan pendekatan sosiologis

a. Paradigma Sosiologis

Periode utama sejarah manusia dapat dipandang sebagai perangkat paradigma tertentu dalam sistem kepercayaan, yakni definisi yang jelas tentang realitas kehidupan fisik dan sosial. Dengan demikian, jenis-jenis teori atau penjelasan khusus mendefinisikan realitas sosial dalam hal-hal tertentu pada perkembangan sosial.

b. Paradigma Metafisik

Definisi awal dan formal manusia akan realitas dapat dipandang sebagai metafisik. Hal ini berawal dari perkembangan peradaban Yunani.

¹⁰Skripsi ditulis oleh Muhammad Iqbal yang berjudul *Konsep 'ashabiyah menurut Ibnu Khaldun* telah diterbitkan pada tahun 2007 M/ 1428 H. (Diakses di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Paradigma ini berlawanan dengan Atheisme primitif yang menggambarkan kemunculan diri manusia dalam hal-hal yang mistik dan tidak dikenal.

c. Paradigma Teologi

Perkembangan masyarakat menengah mungkin dilihat sebagai sebagai sebuah bentuk pelembagaan masyarakat kristiani yang mistikal dan irasional. Banyak tuhan menjadi satu tuhan dengan trinitasnya, yang mengawasi seluruh alam semesta, tetapi berhubungan dengan umat manusia dalam bentuk manusia.

d. Paradigma Filsafat

Secara ringkas, tahap ketiga dalam perkembangan berfikir manusia adalah berfikir filosofis dari segi isi-*philosophical in content*. Dengan runtuhnya kekuatan gereja Eropa, muncullah perkembangan yang lebih politis dan sekuler.

e. Paradigma Positivistik

Sejak filsafat pencerahan melibatkan keyakinan dalam menyikapi eksistensi tatanan alam, sebagaimana rasionalitas manusia, logislah apabila para pemikir ini harus mengembangkan sebuah metodologi untuk memahami dan mengawasi fenomena-fenomena ini. Francis Bacon, sebagai seorang prototipe serta pemikir abad ke-19, telah mengembangkan sebuah paradigma positivistik sebagai perluasan dari filsafat pencerahan.

2) Konteks pembahasan menggunakan tiga paradigma utama yaitu organik, konflik dan sosio behavioris.

a. Konteks Teori Organik

Teori organik dalam sosiologi berkembang selama fase positivistik yang baru dijabarkan pada abad ke-19 dan dapat diringkas berikut. 1) Revolusi politik dan terpuruknya masyarakat Eropa terjadang menjadi prinsip yang sangat mendasar dan menekankan kebutuhan mendasar untuk membangun kembali tantanan politik dan sosial. 2) Perkembangan industri juga mulai mempercepat pentingnya ekonomi masyarakat sebagaimana kebutuhan politik. 3) Orientasi filsafat terhadap masalah-masalah keterpurukan sosial dan perkembangan industri melahirkan sebuah sistem dari filsafat pencerahan abad ke-18 dan positivisme abad ke-19. 4) Akhirnya orientasi-orientasi ini diarahkan untuk mereflesikan sebuah elit intelektual dari kelas sosial yang lebih tinggi yang wawasan masyarakatnya secara esensial ialah konservatif dan sistemik.

b. Konteks Teori Konflik

Teori konflik berkembang di bawah kondisi masyarakat yang sama. Akan tetapi, para pemikir mendefinisikan bahwa teori konflik ialah pengalaman sosial yang cenderung berbeda.

c. Konteks Perilaku Sosial (*Social Behaviorsm*)

Teori perilaku berbeda dengan dua pendekatan terdahulu yang fokusnya lebih pada individu, yaitu pada level analisis atomik dan manfaat induksinya daripada uraian yang bersifat deduktif. Meskipun demikian,

teori perilaku ini tetap sama dalam hal penerapan gagasan pencerahan yang ideal terhadap masalah-masalah sosial pada masa teknologi industri dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

Kedua, dalam memahami proses pemikiran politik seseorang dalam merumuskan suatu konsep, penulis mencoba menggunakan pendekatan teori studi politik. Setidaknya ada tiga pendekatan dalam ilmu politik dalam rangka studi terhadap berbagai aspek negara dan kehidupan politik¹², yaitu:

1. Pendekatan Tingkah Laku (behavior). Pokok pikiran dalam pendekatan ini adalah bahwa tingkah laku politik lebih menjadi fokus dari pada lembaga-lembaga politik, kekuasaan atau keyakinan politik. Akan tetapi yang lebih menonjol adalah penampilan suatu orientasi tertentu yang mencakup beberapa konsep pokok. Konsep pokok dari pendekatan behavioristik adalah:
 - a. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (*regularity*) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi
 - b. Generalisasi-generalisasi ini pada azasnya harus dapat dibuktikan (*verification*) kebenarannya dengan merujuk kepada tingkah laku yang relevan
 - c. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik penelitian yang cermat
 - d. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi.

¹¹Dadang Kahmad. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009. hal. 57-66. Terjemah dari buku Graham C. Kinloch. *Sociological Theori It Development and Major Paradigm*.

¹² Miriam Budiardjo. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Obor. 1992. hal. 3-8.

- e. Dalam membuat analisis politik nilai-nilai pribadi peneliti sedapat mungkin tidak memainkan peran (*value free*)
 - f. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya.
2. Pendekatan Tradisionalis. Menurut pendekatan ini, pendekatan tingkah laku terlalu lepas dari nilai dan tidak memberi jawaban atas pertanyaan yang berdasarkan pandangan hidup tertentu, seperti sistem politik apakah yang paling baik atau masyarakat bagaimanakah yang sebaiknya dituju atau sebagainya. Dengan demikian pendekatan tradisionalistik menekankan beberapa aspek yaitu nilai-nilai dan norma-norma filsafat, ilmu terapan, historis yuridis dan tidak kuantitatif.
3. Pendekatan *Post Behaviorism*. Pokok pendekatan ini menekankan bahwa penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. Sementara itu cendekiawan mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Pengetahuan politik membawa tanggung jawab untuk bertindak mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.¹³

Ketiga, paradigma pemikiran yang mendasari tentang relasi antara Islam dan ketatanegaraan adalah tiga paradigma yang dikemukakan oleh Masykuri Abdillah, yaitu:

- 1) Paradigma *Integrated* yaitu paradigma yang menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan

¹³ Amin Syukur. *Metodologi Studi Islam*. Semarang: Gunung Djati. 1998. hal. 168-169.

manusia dan Tuhan. Tetapi juga sebuah sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia. Para pendukung paradigma ini diaplikasikan untuk semua kehidupan mulai masalah pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik. Paradigma *Integrated* sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari *din* (agama), *daulah* (negara) dan *dunya* (dunia). Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan empat *al-Khulafa al-Rasyidin*.

- 2) Paradigma *Intersectional*. Teori ini menolak paradigma bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi paradigma ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Refleksi para pendukung paradigma ini dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan tetapi juga dalam format pemikiran kelembagaan politik mereka. Paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi

nilai-nilai Islam intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi diantara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil kulturalisasi dan bukannya politisasi.

- 3) Paradigma ini dapat disebut sebagai Paradigma *Separated* yaitu teori yang menolak baik itu teori *Integrated* maupun teori *Intersectional*. Paradigma ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan menjadi kepala suatu negara.¹⁴

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), metode ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena dalam penelitian ini yang menjadi acuan penelitian adalah penelitian konten analisis, biasa digunakan dalam penelitian komunikasi.

¹⁴ *Op.cit.* hal. 1-3.

Namun, dapat juga dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah corak pemikiran tokoh. Dalam hal ini, yang menjadi objek tokoh penelitian adalah Ibnu Khaldun tentang Relasi Agama dan Negara (Kekuasaan).¹⁵

Sebagai suatu kajian yang bersifat kepustakaan, maka metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah termasuk klasifikasi penelitian *library research*, yaitu pengumpulan serta pengelolaan suatu data dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data-data tersebut akan disajikan agar data-data tersebut berkaitan dengan fokus kajian. Sedangkan, sifat penelitian sendiri adalah termasuk historis faktual terhadap tokoh yaitu Ibnu Khaldun dan pemikirannya. Penelitian ini mencoba mengkolerasikan pemikiran tokoh dengan semangat zaman dan lingkungan dimana ia hidup. Sehingga keberadaan pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya dalam hal relasi agama dengan negara akan selalu memiliki keterkaitan dengan dunia abad pertengahan dimana ia berada.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu kitab *Muqaddimah Ibnu Khaldun* yang secara

¹⁵ Cik Hasan Bisri, 2001. Hal 62.

spesifik memuat gagasan dan landasan teoritis Ibnu Khaldun dalam seluruh studi kemasyarakatan dan studi sejarahnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam setiap arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data lain yang menunjang data primer. Buku-buku pendukung atau data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini, yaitu: Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2003., Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010., Firdaus Syam. *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi, Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010., Choirul Mahfud. *39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia Dari Socrates Sampai Barack Obama*. Surabaya: Jaring Pena (Lini Penerbitan Jp Books) Anggota IKAPI. 2009., A. Syafii Maarif. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996., Ayi Sofyan. *Etika Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012., Syarif, Muhammad Jalal dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad. *al-Fikr al-Siyasyi fi*

al-Islam. Iskandariyah: Dar al-Jami'at al-Mishriyat. 1978., Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: LsiK. 1997., Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana. 1992., Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008., Abdul Qadim Zallum. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-Izzah. 2001. Muhammad Sa'id al-Asymawi. *Menentang Islam Politik*. Bandung: Alifa. 2004.

3) Jenis Data

Sesuai dengan perumusan masalah, maka jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai latar belakang dan paradigma pemikiran politik Ibnu Khaldun
- b. Data mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan negara dalam Muqaddimah
- c. Data mengenai tipologi pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan informasi yang terdapat di perpustakaan. Dalam hal ini adalah membaca dan mengkaji buku (*book survey*/studi kepustakaan) yang berhubungan dengan topik pembahasan dan menginventarisir pemikiran serta kaidah-kaidah yang ada korelasinya dengan perumusan masalah. Teknik

pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mengamatnya terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan masalah relasi agama dan negara (kekuasaan) perspektif Ibnu Khaldun
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data untuk diformulasikan sesuai rumusan masalah
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan yang disistematisasikan dengan beberapa bukti, kaidah, teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid.

5) Analisis Data

Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua informasi tentang pemikiran Ibnu Khaldun yang telah terkumpul baik dari sumber primer maupun sumber sekunder serta dari sumber lainnya.
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam latar belakang dan paradigma pemikiran politik Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan negara dalam Muqaddimah, serta tipologi pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara
- c. Menghubungkan data dengan teori siklus sejarah dan pemikiran politik tentang relasi agama dengan negara (kekuasaan) menurut perspektif Ibnu Khaldun.